



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021





**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2021**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
FEBRUARI 2022**

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2021.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2021 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2022
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Wawas Swathatafrijiah

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melalui Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2021 antara lain :

- a. Realisasi Anggaran

Pagu DIPA	: Rp27.066.374.000,-
Realisasi	: Rp26.898.446.068,-
Persentase	: 99,38%
Sisa Anggaran	: Rp167.927.932.-
- b. Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal, diperoleh melalui kegiatan pengolahan Data dan Informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal. Cara pengukuran Indikator ini dengan Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian. Realisasi batas toleransi material di tahun 2021 sebesar 0,033% dengan 2 laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Semester I dan II dan telah memenuhi target yang ditetapkan;
- c. Indikator Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Hasil indikator ini diperoleh dari kegiatan Data dan Informasi terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan sebesar 8%. Cara Pengukuran indikator ini adalah Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan

total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun. Hasil yang diperoleh selama tahun 2021, Jumlah total Rekomendasi sebanyak 960. Laporan yang dihasilkan sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I-IV 2021. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti tidak ada (0). Realisasi Indikator ini adalah 0%;

- d. Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum. Target yang ditetapkan sebesar 85%. Cara pengukuran Indikator ini adalah Persentase Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas. Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2021, Jumlah Pengaduan yang diterima sebanyak 319 kali pengaduan, diantaranya 1 kali berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti baik yang tidak berkadar pengawasan maupun yang berkadar pengawasan (tercapai 100%);
- e. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi. Target yang ditetapkan sebesar 91,5%. Cara pengukuran Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Data rekomendasi yang digunakan adalah rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya (T-1). Laporan yang dihasilkan sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I-IV 2021. Realisasi Indikator ini yang dihitung selama tahun 2020 mencapai 93,76%, melebihi target yang telah ditetapkan.;
- f. Indikator Nilai RB Area Penguatan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi Indikator ini melalui kegiatan Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Pelaksanaan PMPRB, Pelaksanaan penilaian Zona Integritas dalam rangka predikat WBK dan WBBM. Target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 71%. Cara pengukurannya adalah nilai indeks RB pada area penguatan pengawasan dibandingkan bobot maksimal dan dikali 100%. Realisasi tahun 2021 adalah 89,76% melebihi target yang ditetapkan;
- g. Indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) dengan target yang ditetapkan sebesar level 3. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemetaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian. Cara pengukuran indikator ini adalah

Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Pada tahun 2021, penilaian maturitas dilakukan secara agregat Kementerian Perindustrian dan tidak dilakukan per unit Eselon I. Realisasi MRI tahun 2021 sebesar 2,62 berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2020-2021 Nomor B/738/SJ-IND/KU/XI/2021 tanggal 26 November 2021. Sedangkan untuk target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah 1 (satu) kegiatan dan sudah terlaksana;

- h. Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 75%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk Indikator ini adalah Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal. Cara pengukuran indikator ini menggunakan alat bantu kuesioner. Realisasi indikator ini di tahun 2021 ini adalah 87,5% melebihi dari target yang telah ditetapkan;
- i. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar Level 3. Kegiatan yang dilakukan adalah beberapa kegiatan yang termasuk dalam dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal. Realisasi di tahun 2021 Berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, kapabilitas APIP Kemenperin telah mencapai Level 3 dengan catatan;
- j. Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 75%. Kegiatan penunjang indikator ini adalah Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja dan Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal. Cara pengukuran indikator ini adalah Perbandingan Pagu dan realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang menggunakan produk dalam negeri. Realisasi yang diperoleh selama tahun 2021 sebesar 93,97% melebihi target yang ditetapkan;
- k. Indikator Efektivitas Regulasi Bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 74%. Cara pengukuran indikator ini dilihat dari perolehan hasil monev dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Realisasi yang diperoleh selama tahun 2021 sebesar 75%, melebihi target yang ditetapkan;

- l. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 78,2. Kegiatan yang mendukung Indikator ini adalah Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja dalam kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB pada setiap Instansi Pemerintah. Cara pengukuran indikator ini melalui Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Realisasi yang diperoleh Inspektorat Jenderal di tahun 2021 adalah 80,1 melebihi target yang ditetapkan;
- m. Indikator Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Cara pengukuran indikator ini adalah menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan rencana kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Realisasi yang diperoleh di tahun 2021 adalah 100% (seluruh kegiatan pengawasan dilakukan di tahun 2021);
- n. Indikator Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya dengan target yang ditetapkan adalah 90%. Cara pengukuran Indikator ini melalui Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Realisasi yang diperoleh di tahun 2021 adalah 100%;
- o. Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Kegiatan pendukung indikator ini adalah Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor, Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk, Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran. Cara pengukuran indikator ini adalah realisasi indikator ini dihitung dari hasil survei kepuasan pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dijalankan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Realisasi yang diperoleh ditahun 2021 adalah 74,15;
- p. Indikator Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal, dengan target yang ditetapkan sebesar 91%. Cara pengukuran yang dilakukan melalui Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil *Self Assessment*. Realisasi yang diperoleh di tahun 2021 sebesar 91% sesuai target yang telah ditetapkan;
- q. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 74. IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan

dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai IKPA Inspektorat Jenderal sebesar 75,71 melebihi dari target yang telah ditetapkan;

- r. Indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 71. Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi yang diperoleh adalah 76,33 melebihi dari target yang telah ditetapkan;
- s. Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dengan target yang ditetapkan sebesar 60%. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan dikali 100%. Realisasi di tahun 2021 adalah 64% melebihi target yang ditetapkan;
- t. Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat dengan target yang ditetapkan sebesar 75%. Cara pengukuran indikator ini adalah membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Realisasi yang diperoleh di tahun 2021 adalah 77,88% melebihi dari target yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Kementerian Perindustrian.....	5
BAB II . PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Perencanaan Kinerja	8
A. Dokumen Perjanjian Kinerja.....	18
2.2 Dukungan Anggaran	20
□ Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1 Analisis Capaian Organisasi	24
BAB IV. PENUTUP.....	77
A. Keberhasilan.....	77
B. Permasalahan/Kendala	78
C. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	3
Bagan 2 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	4
Bagan 3 pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia	6
Bagan 4 Distribusi Pegawai PNS Sekretariat Inspektorat jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Bagan 5 Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal	7
Bagan 6 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	17
Bagan 7 Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2019-2021.....	30
Bagan 8 rata-rata nilai PMPRB unit pusat tingkat Kementerian Perindustrian tahun 2021 ..	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal	5
Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	10
Tabel 3 Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal	12
Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2019,2020 dan 2021	18
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2021	19
Tabel 6 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021	20
Tabel 7 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)	25
Tabel 8 Jumlah Saldo Temuan Satker Kemenperin.....	27
Tabel 9 Rekap Saldo Temuan Tindak Lanjut Hasil pengawasan	29
Tabel 10 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan .	30
Tabel 11 Perbandingan persentase Tindak Lanjut Kementerian	31
Tabel 12 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)	31
Tabel 13 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	32
Tabel 14 Ringkasan penilaian RB	34
Tabel 15 Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian	35
Tabel 16 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	36
Tabel 17 Kategori Kinerja Unit Pelayanan.....	38
Tabel 18 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.....	41
Tabel 19 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)	41
Tabel 20 sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa	42
Tabel 21 sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	43
Tabel 22 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	45
Tabel 23 hasil penilaian SAKIP Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian ...	47
Tabel 24 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	48
Tabel 25 Hasil Pengolahan dari Survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	49
Tabel 26 Sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.....	54
Tabel 27 Tabel Pelaksanaan diklat Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	57

Tabel 28 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal dari tahun ke tahun.....	63
Tabel 29 Rasio penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	64
Tabel 30 Revisi DIPA selama tahun 2021 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan	66
Tabel 31 Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	68
Tabel 32 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja	68
Tabel 33 Kendala dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Sekretariat inspektorat Jenderal	70

BAB I . PENDAHULUAN

A. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan inspektorat jenderal;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik dengan tersusunnya program/kegiatan tahun 2022 yang didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pengawasan dalam mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* dan penjamin mutu kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

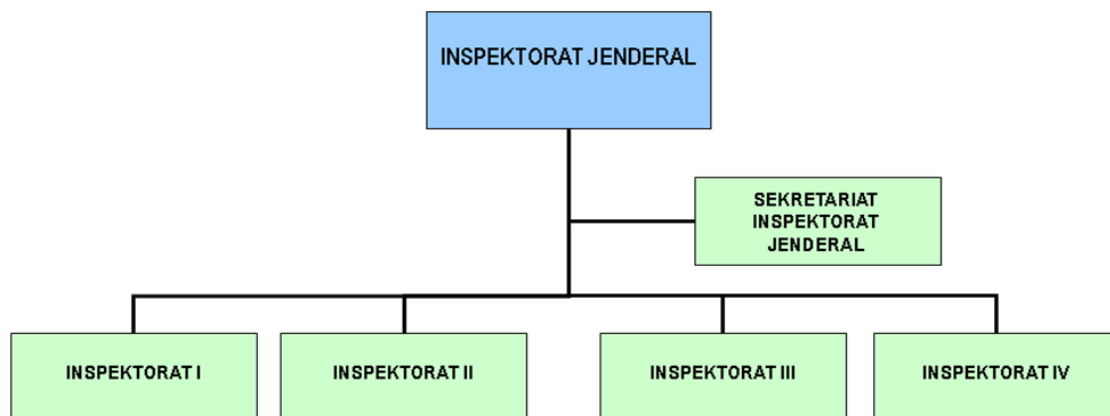
Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

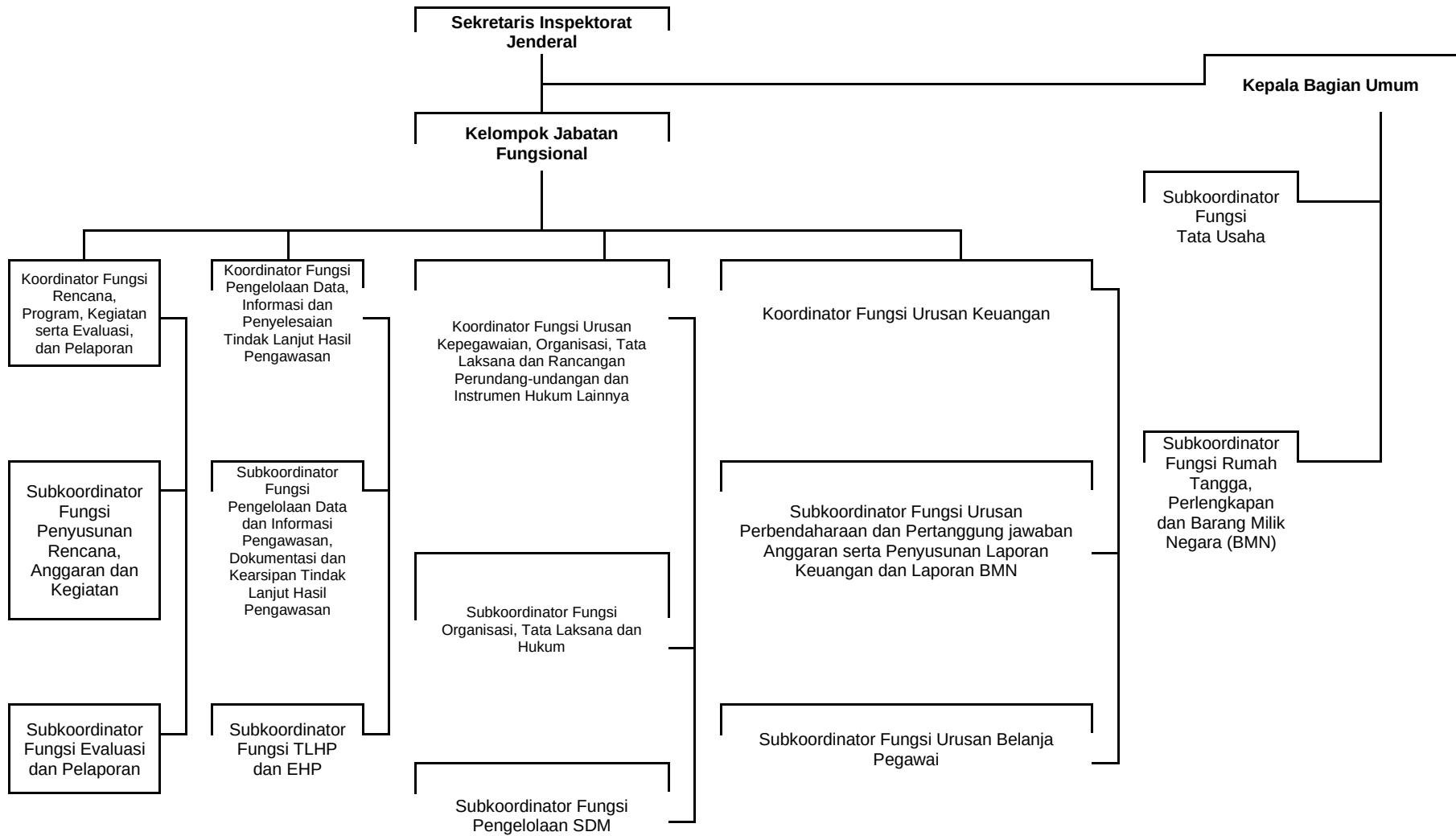
C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- 1 (satu) eselon I;
- 5 (lima) unit eselon II;
- 1 (satu) unit eselon III;
- 4 (empat) unit eselon IV;
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya;
- Kelompok Jabatan Fungsional Umum



Bagan 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Bagan 2 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Barang Milik Negara, Tata Usaha, dan Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- b. Pelaksanaan urusan manajemen kinerja inspektorat jenderal.

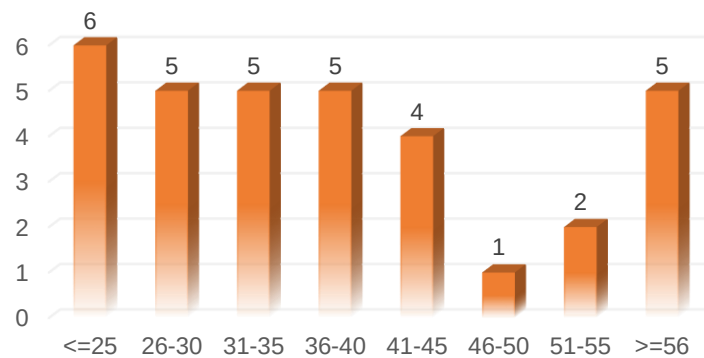
2. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Kementerian Perindustrian

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	1
2	Eselon II	1
3	Eselon III	1
4	Fungsional Lainnya	7
5	Fungsional Umum	23
Total		33

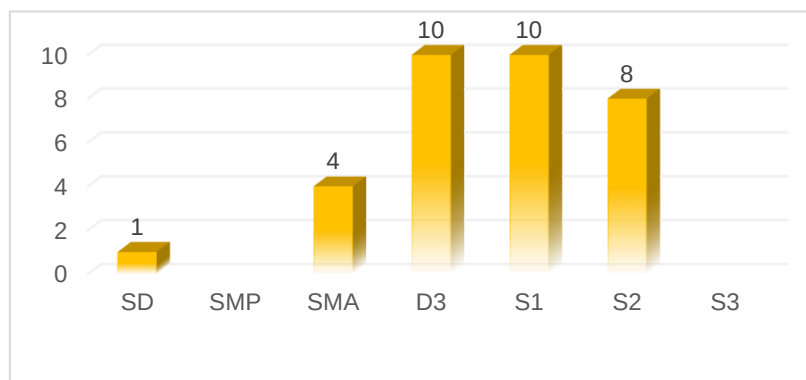
Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 1 orang pejabat eselon I, 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 7 orang Fungsional lainnya, 23 fungsional umum. Berikut adalah distribusi pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia :



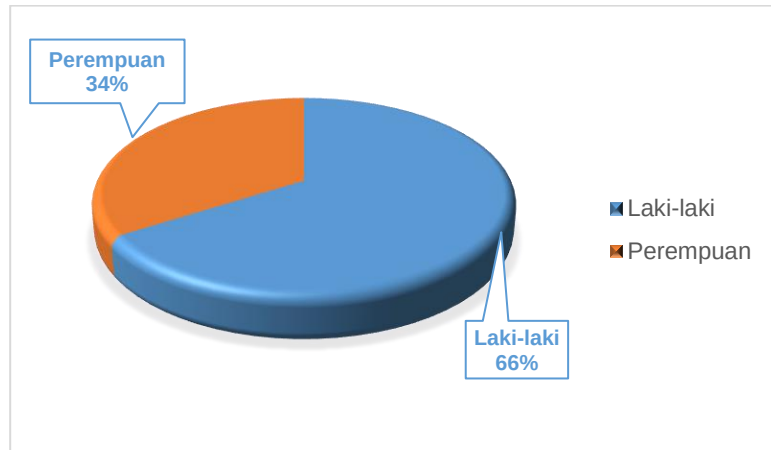
Bagan 3 pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia

Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari golongan I sejumlah 1 orang, golongan II sejumlah 12 orang, golongan III sejumlah 11 orang dan golongan IV sejumlah 9 orang.

Total pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian ditambah dengan pegawai Non PNS berjumlah 50 Pegawai, yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 17 orang perempuan.



Bagan 4 Distribusi Pegawai PNS Sekretariat Inspektorat jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Bagan 5 Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal dihadapi dengan masalah perubahan struktur organisasi dimana sebelumnya berdasarkan Permenperin nomor 35 tahun 2018 berubah menjadi Permenperin nomor 7 tahun 2021. Dengan adanya perubahan ini, kendala yang dihadapi berupa kurang optimalnya pendelegasian tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan. Hal lainnya adalah disposisi pelaksanaan tugas dari pimpinan yang tidak tepat sasaran dalam hal menindaklanjuti surat yang masuk ke Sekretariat Inspektorat Jenderal.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan visi *“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

Adapun misi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”

Perencanaan stratejik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Mendukung tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal	Tj 1.1	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	4	4
			Tj 1.2	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi auditor	Nilai	BB	BB	A	A	A
			Tj 1.3	Terselenggaranya dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal	Dukungan kesekretariatan pengawasan Inspektorat Jenderal	Layanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka Sasaran strategis yang digunakan adalah melalui kegiatan **”Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal”** dengan sasaran yang dapat dilihat pada tabel Rencana Strategis (Renstra) berikut ini:

Tabel 3 Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Stakeholders Perspective								
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		2	Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%
		4	Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	70%	71.00%	72%	73%	74.00%
		2	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Internal Process Perspective								
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Capaian IACM Itjen	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU	-	75%	80%	85%	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	72%	74%	76%	78%	80%
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78	78.2	78.4	78.6	78.8
Learn & Growth Perspective								
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	-	70%	72%	74%	76%
		2	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%
		3	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%
		4	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	90%	91%	92%	94%	96%
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	belum ada	74	75	76	77
8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Itjen	-	71	73	76	80
		2	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	60%	65%	70%	75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
		3	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%	75%	76%	77%	78%

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. *Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal;
 - b. Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
 - c. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti;
 - d. Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker.
2. *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai RB Area Penguatan Pengawasan.
 - b. Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

Perspektif Proses Bisnis Internal

3. *Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan;
 - b. Capaian IACM Inspektorat Jenderal*)IKU
4. *Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa* dengan indikator sebagai berikut:

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU
5. *Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif* dengan indikator sebagai berikut:

Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal

6. *Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel* dengan indikator sebagai berikut:

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal

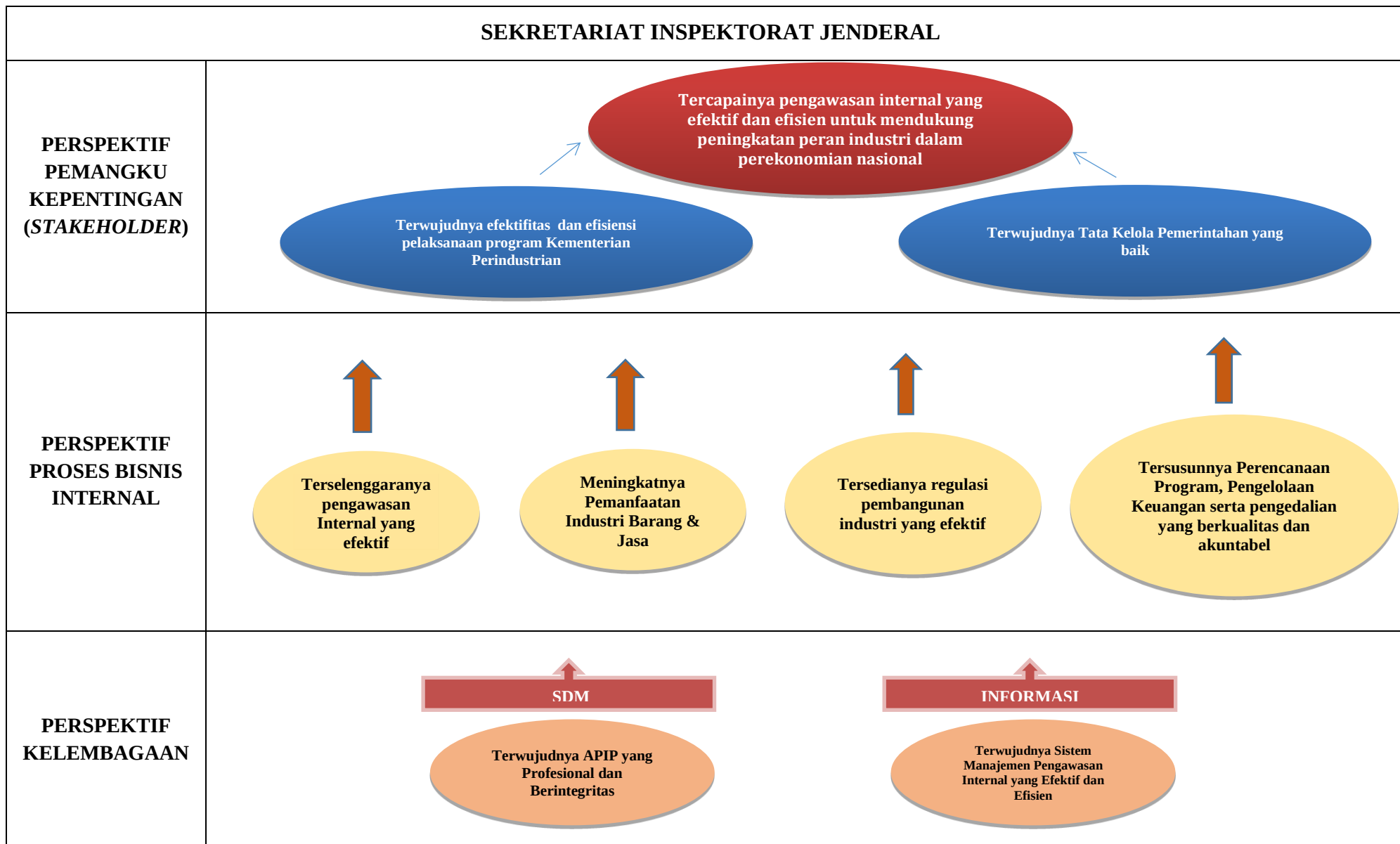
Perspektif Kelembagaan

7. *Terwujudnya sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien*, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
- b. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT;
- c. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;
- d. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen;
- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);

8. *Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas*, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
- b. Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
- c. Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat.



Bagan 6 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

A. Dokumen Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2021 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2019, 2020 dan 2021:

Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2019,2020 dan 2021

Perubahan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Dari sisi Perspektif	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan
Dari sisi Sasaran Strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 1 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 4 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 1 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 18 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 16 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 18 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2021, Sekretariat Inspektorat Jenderal membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 Laporan
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 Laporan
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 Laporan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	1 Kegiatan
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU	IACM Level 3
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	75%
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Berkualitas dan Akuntabel		
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%
		Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	80%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	74
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%

2.2 Dukungan Anggaran

Unit Sekretariat Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2021 memiliki anggaran sebesar Rp32.643.630.000,- namun kemudian dilakukan revisi menjadi Rp27.066.374.000,- dengan 3 (tiga) output (keluaran). Adapun alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		32.643.630.000	27.066.374.000
6036.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	25.107.244.000	20.750.871.000
6036.EAA.001	Layanan Perkantoran	1 Bulan	25.107.244.000	20.750.871.000
001	Gaji dan Tunjangan		19.779.464.000	15.242.091.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		19.779.464.000	15.242.091.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.327.780.000	5.508.780.000
A	Honorarium Operasional		2.069.320.000	1.705.834.000
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		356.775.000	589.970.000
C	Biaya Langganan dan operasional perkantoran		1.197.000.000	1.193.550.000
D	Koordinasi dan layanan pimpinan		877.188.000	1.160.434.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		827.497.000	858.992.000
6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	5.593.596.000	4.439.258.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036.EAB.001	Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	1 Layanan	5.593.596.000	4.439.258.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		615.710.000	732.230.000
A	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2022		177.860.000	152.000.000
B	Penyusunan dan Revisi RKAKL Inspektorat Jenderal		139.530.000	2.200.000
C	Fasilitasi Reviu RKAKL		58.120.000	-
C	Penyusunan Anggaran 2022		-	9.000.000
D	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		16.200.000	2.900.000
E	BIMBINGAN DAN PENGAWASAN ASPEK PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		224.000.000	566.130.000
053	Pengelolaan Keuangan		707.270.000	225.520.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		172.840.000	106.720.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN		211.820.000	10.150.000
C	Penyusunan Laporan Keuangan dan BM		99.490.000	9.730.000
D	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		32.220.000	
D	Penyusunan RK-BMN			1.560.000
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		40.900.000	2.200.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		150.000.000	95.160.000
055	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		646.596.000	453.467.000
A	Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum		206.502.000	92.767.000
B	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal		193.250.000	2.200.000
C	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja		34.200.000	14.800.000
D	Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor		22.944.000	4.000.000
E	Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Inspektorat Jenderal		22.200.000	2.200.000
F	Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian		167.500.000	337.500.000
056	Pengelolaan Kepegawaian		1.762.498.000	393.124.000
A	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal		217.708.000	130.834.000
B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal		977.638.000	157.270.000
C	Peningkatan Kerjasama SDM Pegawai Inspektorat Jenderal JPT dan JFU (Team Building)		368.470.000	-
D	Pelatihan Di Kantor Sendiri (In-House Training)		40.950.000	39.000.000
E	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		48.400.000	31.000.000
F	Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		35.950.000	16.600.000
G	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai ITJEN		-	9.400.000
H	Fasilitasi Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor		13.700.000	-
I	Pemetaan Job Profiling Jabatan Fungsional Umum Pegawai ITJEN		12.700.000	-
J	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai ITJEN		12.882.000	2.200.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
K	Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		15.000.000	6.820.000
057	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		175.900.000	982.496.000
A	Koordinasi Dalam Rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal		71.040.000	90.196.000
B	Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif		14.000.000	33.000.000
C	Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan		42.040.000	821.140.000
D	Pengembangan Informasi Pengawasan		48.820.000	38.160.000
059	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler		165.756.000	162.182.000
A	Pemutakhiran Data dan Informasi		12.536.000	11.036.000
B	Penerbitan Majalah Solusi		153.220.000	151.146.000
060	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		1.519.866.000	1.490.239.000
A	Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian		27.878.000	4.926.000
B	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		70.800.000	16.050.000
C	Penilaian Index Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian		502.678.000	115.490.000
D	Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		281.480.000	110.450.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian		369.750.000	148.788.000
F	Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan		267.280.000	652.650.000
G	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan		-	441.885.000
6036.EAD	Layanan Sarana Internal	1 Unit	590.000.000	644.437.000
6036.EAD.001	Layanan Sarana Internal Inspektorat Jenderal	1 Layanan	590.000.000	644.437.000
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		290.000.000	644.437.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		290.000.000	644.437.000
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		300.000.000	-
6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	568.290.000	260.380.000
6036.EAK.001	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	2 Laporan	568.290.000	260.380.000
A	Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		237.030.000	260.380.000
B	Temu Teknis Penyuluhan / Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		148.700.000	110.360.000
C	Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		57.060.000	2.200.000
D	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan		125.500.000	-
6036.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13 Laporan	784.500.000	371.428.000
6036.EAL.001	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Inspektorat Jenderal	13 Laporan	784.500.000	371.428.000
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		253.660.000	135.408.000
A	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja		223.190.000	126.088.000
B	Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan, Reviu Perkin		5.100.000	1.100.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
C	Penyusunan dan Reviu LAKIN ITJEN dan SET ITJEN		7.320.000	1.100.000
D	Penilaian SAKIP Eselon II ITJEN		10.200.000	1.760.000
E	Reviu Renstra		3.650.000	4.480.000
F	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		4.200.000	880.000
052	Penyusunan Laporan		530.840.000	236.020.000
A	Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan		164.920.000	66.160.000
B	Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri		134.500.000	109.200.000
C	Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		45.220.000	3.960.000
D	Penyusunan Laporan APIP		20.500.000	3.400.000
E	Penilaian SAKIP Eselon I		15.700.000	1.100.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		150.000.000	52.200.000
6036.QEC	Bantuan Produk	200 Paket	-	600.000.000
6036.QEC.001	Bantuan Masker dalam rangka Mendukung pelaksanaan PPKM Mikro			600.000.000
051	Pengadaan Masker Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro			600.000.000
A	Pengadaan Masker Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro			600.000.000

Sumber: Sub bagian Program

- **Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2021 disajikan pada rencana aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang menjadi lampiran laporan ini.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/ layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2020. Penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan melalui pengukuran kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Analisis Capaian Organisasi

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut:

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran 1: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90 %	85%	100%	117,64%
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

a. Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dan pemutakhiran data dalam rangka memenuhi Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal. Koordinasi yang dilakukan berupa koordinasi dengan unit kerja pusat dan vertikal dalam rangka Penyelesaian tindak lanjut atas saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dilaksanakan secara rutin, Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif). BPK telah Me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana Laporan Nomor 7b/LHP/XV/05/2021 sebagai berikut:

Pada tahun 2021 ini, realisasi jumlah temuan BPK atas laporan keuangan yaitu 0.033% yang dapat di formulasikan sebagai berikut:

<i>temuan BPK</i>	=	<i>Rp 653,625,627.60</i>
<i>realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2020</i>		<i>Rp 1,975,729,108,365</i>

maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,033% dan telah mencapai target. Kegiatan koordinasi ini menghasilkan 2 (dua) laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Semester I dan II. Keberhasilan tercapainya target indikator ini tidak lepas dari pelaporan keuangan Kementerian Perindustrian yang dilakukan secara akuntabel, efektif dan efisien sehingga temuan BPK yang bernilai uang tidak melebihi dari batas toleransi temuan yang ditetapkan.

b. Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti

Untuk mengukur capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama satu tahun. Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif). Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satker. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021 ini, tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Jumlah Saldo Temuan Satker Kemenperin

NO.	Satker	Jml Temuan	Jml Tindak Lanjut	Saldo Temuan	Sesuai Rekomendasi	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Pusat	215	103	114	129	0
2	Balai Besar	167	164	3	201	0
3	Baristand	103	93	10	119	0
4	Balai Diklat	29	9	20	16	0
5	Sekolah	116	60	56	97	0
6	Dekonsentrasi	96	68	28	80	0
TOTAL		726	497	231	642	0

Hasil yang diperoleh selama tahun 2021, tidak ditemukan data yang tidak dapat ditindaklanjuti (Realisasi Indikator ini sebesar 0%). Karena perhitungan indikator ini termasuk minimasi, artinya semakin kecil realisasi maka semakin baik capaiannya Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 100%. Indikator kinerja ini berperan dalam memperbaiki kualitas auditor dalam menganalisa temuan dan pemberian rekomendasi menjadi lebih efektif dan dapat dilaksanakan. Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan menghasilkan 4 (empat) laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I-IV 2021. Keberhasilan pencapaian realisasi yang melebihi target indikator ini dilihat dari seluruh data temuan auditor dari hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh satker (satker dapat memenuhi dokumen maupun hal lain yang diminta auditor terkait kinerja organisasi).

c. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal bertugas untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/PER/10/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat.

- Periode 1 Januari s/d 30 April 2021, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 93 (Sembilan Puluh tiga) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 Mei s/d 30 Agustus 2021, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 90 (Sembilan Puluh) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 September s/d 31 Desember 2021, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 136 (Seratus tiga puluh enam) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan dan 1 (satu) kali berkadar pengawasan terkait masalah kepegawaian. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021, realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 117,64%. Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk hanya sedikit dan langsung ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah cukup baik.

d. Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker

Kegiatan pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker menghasilkan 4 (empat) laporan. Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal

yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker dibagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1).

Tabel 9 Rekap Saldo Temuan Tindak Lanjut Hasil pengawasan

NO.	Satker	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Saldo Temuan	SR	BSR
1	Pusat	247	Rp 158,709,318.00	145	102	214	89
2	Balai Besar	75	Rp 1,453,547.92	75	0	90	0
3	Baristand	28	Rp -	24	4	31	4
4	Balai Diklat	23	Rp -	23	0	28	0
5	Sekolah	119	Rp 40,544,868.88	100	19	158	17
6	Dekonsentrasi	0	Rp -	0	0	0	0
TOTAL		492	Rp 200,707,734.80	367	125	521	110

Sumber: Sub Bagian Pemantauan Tindak Lanjut

Di tahun 2020, total rekomendasi dari seluruh satker terdapat 673 rekomendasi. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 521 dan rekomendasi yang belum sesuai 110 rekomendasi. Sehingga total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 631 (Jumlah sesuai rekomendasi dan Belum sesuai rekomendasi). Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020 diperoleh realisasi 93,76% atau capaian indikator sebesar 102,46%

Hasil rekomendasi tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan tahun 2021 ini menunjukkan bahwa indikator ini dapat melampaui target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2021. Selain itu nilai ini lebih baik dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terus menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 10 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan

Perbandingan Capaian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	91,87 %	88,77 %	70,37 %	67,57 %	93,76 %



Bagian 7 Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2019-2021

Diharapkan tahun 2022, realisasi Indikator ini dapat terus melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Tahun 2022 ini juga diharapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung indikator ini dapat terlaksana dengan lebih baik, efektif dan efisien mengingat kebijakan Pemerintah terkait mobilitas masyarakat di masa pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengawasan dari sisi waktu.

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan persentase Tindak Lanjut Kementerian

Tahun	K/L									
	Perhubungan		Perindustrian		Pertanian		PDT		KKP	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2017	85%	93,72%	87%	91,87%	80%	69,89%	80%	N/A	83%	77%
2018	87%	94,07%	88%	88,77%	80%	66,67%	90%	60%	83,5%	76,91%
2019	90%	79,26%	88%	70,37%	90%	80,76%	70%	75%	84%	87,45%
2020	85%	87,36%	91%	67,57%	75%	78,9%	53%	61,52%	60%	83,77%
2021	Belum ada data	Belum ada data	91,5%	93,76%	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data

*Dari berbagai sumber

Perbandingan indikator “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	90%	70,34%	80%	62%	91,5%	93,76%
BPOM	46,95%	40,32%	90%	92,98%	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	92%	96,40%	60%	83,77%	Belum ada data	Belum ada data

Dari tabel di atas terlihat bahwa target “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

Keberhasilan kegiatan koordinasi pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker ini dalam memenuhi target yang ditetapkan tidak lepas dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti yang terlaksana dengan baik sehingga dalam penyusunan laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan yang dihasilkan di tahun 2021 adalah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I-IV 2021.

Sasaran 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yang ditetapkan pada tahun 2021, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 13 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	89,76%	118,57%
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

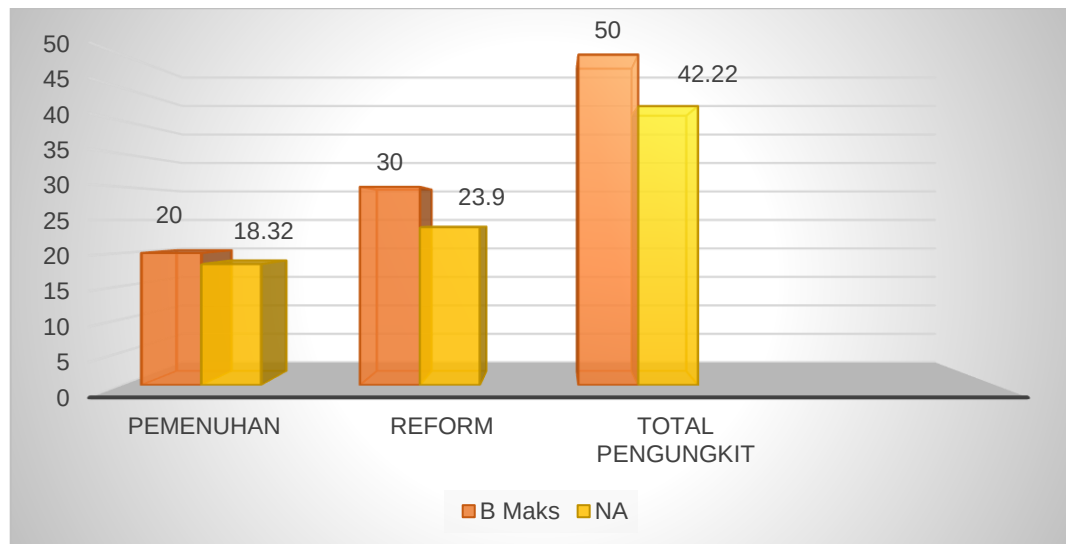
a. Nilai RB Area Penguatan Pengawasan

Indikator ini dapat dilihat dari hasil konsensus antara seluruh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian). Kementerian Perindustrian telah melaksanakan PMPRB sejak awal bulan 31 Mei 2021 hingga 15 Juni 2021 dimana panel penilaian dilakukan sebanyak 3 kali. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian) sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk menjamin kualitas hasil penilaian, maka pelaksanaan penilaian mandiri didampingi oleh Tim *Quality Assurance* dari Inspektorat Jenderal.

Nilai Akhir PMPRB Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Nilai PMPRB Unit Kerja Eselon I rata-rata sebesar 33,74 dari 36,30 (92,95%),
2. Nilai PMPRB Unit Pusat (Kementerian) sebesar 83,25 dari 100,00 (83,25%),
3. Nilai Index PMPRB Kementerian Perindustrian sebesar 84,32 dari 100,00 (79,17%).

Berikut ini adalah rata-rata nilai PMPRB unit pusat tingkat Kementerian tahun 2021:



Bagan 8 rata-rata nilai PMPRB unit pusat tingkat Kementerian Perindustrian tahun 2021

Keterangan:

B Maks : Bobot Maksimal
NA : Nilai Akhir

Sedangkan Indikator Nilai RB area penguatan pengawasan dihitung dari Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB.

Berikut ini adalah tabel ringkasan penilaian RB :

Tabel 14 Ringkasan penilaian RB

Penilaian	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Maksimum Penilaian RB berdasarkan Ketetapan MenPAN RB
Pemenuhan (Penguatan Pengawasan)	2,35	2,5
Reform (Penguatan pengawasan)	3,26	3,75
Total	5,61	6,25

Nilai Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan dapat dilihat pada ringkasan penilaian RB penguatan pengawasan yang terdiri dari pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,35 dan 3,26 adalah 5,61. Sedangkan jumlah bobot maksimal pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,5 dan 3,75 adalah 6,25. Sehingga Nilai penguatan pengawasan yang didapat dari perbandingan pemenuhan dan reform dengan bobot maksimal adalah sebesar 89,76%. Capaian dari Indikator ini adalah 118,57%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan diperoleh dari hasil kemajuan pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perindustrian dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

b. Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan *Quality Assurance* oleh APIP.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2021 ini telah dilaksanakan pada September 2021. Penilaian maturitas SPIP tahun 2021 tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2020/2021

menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**berkembang**” atau tingkat **2 (dua)** dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 2,772. Hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	3	1,200
2.	Struktur dan Proses	2	0,747
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,825
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2	2,772
	- MRI	2	2,620
	- IEPK	3	3,220

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai Indeks Manajemen Risiko yang diperoleh adalah 2,620. Realisasi ini berada pada level 2 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini didahului dengan diadakannya Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal selaku koordinator penilaian mandiri SPIP Kementerian Perindustrian serta dengan BPKP untuk teknis pelaksanaan penilaian SPIP di tahun berikutnya.

PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL

Sasaran 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif

Indikator dari sasaran terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	87,5%	116,67%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *) IKU	Level 3	Level 3	100%

a. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan

Indikator ini dinilai dengan dilakukannya e-survey tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal.

Survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan secara online (e-survey) diakhir tahun 2020 sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 108/IJ-IND.1/PR/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Aspek yang dinilai dari survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Kematangan dan Profesionalisme;
2. Kepemimpinan/hubungan antar personel;
3. Manajemen waktu;
4. Pengetahuan Standar/Interpretasi;
5. Kemampuan Analisis Permasalahan;
6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian/temuan;
7. Kemampuan memberikan rekomendasi;

8. Pada rapat pembukaan/ *Entry Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Pengenalan anggota;
 - b. Maksud, tujuan dan metode yang digunakan;
 - c. Kategori ketidaksesuaian/temuan;
 - d. Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan;
 - e. Auditor memberikan kesempatan untuk auditi untuk bertanya;
 - f. Auditor berpenampilan baik.
9. Pada rapat penutupan / *Exit Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Penjelasan ringkas tentang kegiatan selama audit;
 - b. Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
 - c. Ketua Tim Auditor memberikan kesempatan kepada auditi untuk bertanya tentang ketidaksesuaian/temuan yang ditemukan;
 - d. Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditi.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan secara online dan diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian nilai persepsi untuk setiap jawaban responden;
- b. Perhitungan Total Nilai Persepsi dan Nilai Rata-Rata per pertanyaan;
- c. Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Pertanyaan;
- d. Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan.

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan langkah-langkah pengolahan data diatas diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 87,50 atau apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah sebesar 87,50%. Adapun Kategori Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik (PermepanRB Nomor 14 Tahun 2017) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17 Kategori Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,064-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,532-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal berdasarkan survei yang dilakukan yaitu sebesar **87,5** atau **87,5%** dengan kategori kinerja unit pelayanan **Baik** dan mutu pelayanan **B**. Capaian Indikator ini sebesar 116,67%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dilihat dari banyaknya responden yang menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik dan memenuhi standar AAIPi.

Beberapa saran yang masuk dari survei tersebut dan perlu dijadikan pertimbangan adalah:

- Beberapa penerapan kebijakan terkesan kaku walaupun sebetulnya dalam aturan tidak eksplisit diatur demikian. Selain dari itu, kebijakan antara setiap Inspektorat berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakadilan pada saat kebijakan tersebut dibandingkan antara penerapan di unit Eselon 1 yang berbeda. Untuk itu perlu keseragaman atau standar antar Inspektorat agar perlakuan ke auditi juga sama;
- Auditi memerlukan manajemen waktu dan proses dalam tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
- Auditor sudah memenuhi standar sesuai kompetensi, namun perlu dilakukan peningkatan wawasan dengan melakukan brainstorming dengan K/L lain;
- Auditor diharapkan tetap profesionalisme dan lebih meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan.

b. Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU

Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini telah digunakan pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal didukung dengan 4 (empat) kegiatan berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, yaitu:

- a. Pemaparan tentang hasil pemantauan atas rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP yang dilakukan sebelum Bimtek terkait empat elemen yang belum mencapai level 3 yaitu elemen pengelolaan peran dan layanan, elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional dan elemen struktur tata Kelola;
- b. Menjelaskan Key Process Area (KPA) kapabilitas APIP di level 3 beserta rencana aksi yang diperlukan bagi perbaikan pada *Area of Improvement* untuk mencapai level 3;
- c. Identifikasi infrastruktur dan data pendukung yang diperlukan guna pemenuhan pernyataan pada level 3;
- d. Pengenalan dan implementasi aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berbasis Web Dalam *Self-Assesment*.

Uraian rencana tindak yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh adalah sebagai berikut:

- a. Elemen 1: Peran dan Layanan APIP
 - 1) Inspektorat Jenderal telah melakukan finalisasi Pedoman Audit Kinerja sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian tanggal 16 November 2021;
 - 2) Inspektorat Jenderal telah Menyusun konsep SOP penyelenggaraan Klinik Konsultasi tetapi sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemantauan, SOP tersebut belum ditetapkan;

b. Elemen 2: Pengelolaan SDM

- 1) Inspektorat Jenderal telah Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah mengestimasi jumlah dan jenis pengawasan intern yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja pengawasan serta membandingkannya dengan jumlah SDM yang tersedia;
- 2) Inspektorat Jenderal belum memiliki kebijakan pemberian penghargaan berbasis tim.

c. Elemen 3: Praktik Profesional

- 1) Inspektorat Jenderal belum Menyusun PKPT yang mempertimbangkan risiko kegiatan yang terdapat pada masing-masing Eselon I dengan focus pengawasan diarahkan kepada pengawalan terhadap ketercapaian tujuan organisasi khususnya Program Prioritas Nasional yang terdapat pada masing-masing unit Eselon I;
- 2) Inspektorat Jenderal sedang melakukan pemutakhiran data/informasi peta risiko (audit universe) oleh masing-masing unit eselon II sesuai dengan kegiatan prioritas;
- 3) Inspektorat Jenderal telah menyusun konsep Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai kebijakan untuk melaksanakan program penjaminan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program*) atas setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan. Namun konsep Pedoman Kendali Mutu tersebut belum memuat kebijakan untuk penilaian mutu (*Quality Assesment*) secara periodic baik internal (berupa reviu internal antara tim audit) maupun eksternal (melalui telaah sejawat/*peer review*).

d. Elemen 4: Struktur Tata Kelola

- 1) Inspektorat Jenderal sedang Menyusun kebijakan/prosedur/mekanisme pengajuan usulan anggaran APIP yang memperhatikan risiko terkait dengan SOP nomor 01/IJ-IND.1/SOP/2019 tentang menyusun rencana;

- 2) Inspektorat Jenderal belum memiliki SOP terkait usulan pengajuan anggaran yang mencakup Analisa dampak apabila terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dilakukan.

Dari kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal di tahun 2021, Capaian Level IACM mencapai Level 3 dengan catatan.

Tabel 18 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian IACM Inspektorat Jenderal *) IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Perbandingan indikator “Capaian IACM Inspektorat Jenderal” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Kementerian ESDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data	Belum ada data

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menggunakan level kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja terlebih dahulu dibandingkan Kementerian Perindustrian.

Keberhasilan pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih memerlukan upaya untuk menyempurnakan rencana tindak lanjut yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh yang dilihat dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional dan struktur tata kelola.

Sasaran 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa

Indikator dari sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	75%	93,97%	125,3%

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Sekretariat Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2021, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{RA_{P3DN}}{Total_{P3DN}} = \frac{Rp5.672.525.696}{Rp6.036.263.000} \times 100\% = 93,97\%$$

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun sebagai berikut:

521211: Belanja Bahan

521219: Belanja Barang Operasional Lainnya

521811: Belanja Barang Persediaan Konsumsi

522192: Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19

524114: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

521111: Belanja Keperluan Perkantoran

521131: Belanja Barang Operasional-Penanganan pandemi Covid-19

522141: Belanja Sewa

524119: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota

522191: Belanja Jasa Lainnya

521241: Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19

532111: Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dari perhitungan diatas disimpulkan bahwa realisasi dari indikator ini sebesar 93,97% melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 125,3%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari Sebagian besar belanja akun pada Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal.

Sasaran 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Indikator dari sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	75%	101,35%

Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:

$$Er = \frac{SRe}{Ts} \times 100\%$$

Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi

SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya

Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan

Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat. Empat peraturan yang diterapkan adalah

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan ini disahkan pada tanggal 8 Februari 2021, dimana peraturan ini telah digunakan sebagai pedoman dalam penilaian SAKIP di lingkungan Kementerian. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.
- b. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Audit Kinerja Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Keputusan ini disahkan pada tanggal 19 November 2021 dan belum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan ini dinilai kurang efektif dalam penerapannya di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- c. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2021, Keputusan Menteri ini disahkan pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah digunakan sebagai salah satu pedoman dalam kegiatan pengawasan dan konsultasi oleh Inspektorat Jenderal kepada seluruh Unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan ini telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan/kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian serta sebagai pedoman bagi APIP dalam melakukan kegiatan

pengawasan dan konsultansi. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.

Dari keempat regulasi tersebut, hanya 3 (tiga) yang efektif penerapannya dan 1 (satu) tidak efektif penerapannya yaitu terkait Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Audit Kinerja Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Hal yang membuat peraturan tersebut tidak efektif dikarenakan keputusan yang disahkan pada tanggal 19 November 2021 dan belum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sehingga hanya 75% realisasi penerapan regulasi yang efektif selama tahun 2021. Capaian dari realisasi ini adalah 101,35%.

Sasaran 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Indikator dari sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 22 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	80.1	102,43%

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk

dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2021 ini pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit-unit di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 93 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi :

- a. Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%;
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25%;
- c. Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%;
- d. Evaluasi kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10%;
- e. Pencapaian kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%.

Berikut ini adalah tabel hasil penilaian SAKIP Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian:

Tabel 23 hasil penilaian SAKIP Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian

No	Unit Eselon I	KOMPONEN					Nilai	Kategori
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Sasaran/Kinerja		
		30%	25%	15%	10%	20%		
1	Ditjen Industri Agro	24,56	20,94	12,90	9,50	16,71	84,61	A
2	BSKJI	28,85	22,19	10,99	8,71	12,88	83,62	A
3	Ditjen IKMA	24,12	21,88	12,37	8,54	14,16	81,07	A
4	Sekretariat Jenderal	24,12	21,88	12,63	8,08	14,31	81,02	A
5	Ditjen ILMATE	24,40	21,88	12,90	8,54	12,84	80,56	A
6	Ditjen IKFT	24,26	20,94	12,90	7,29	15,20	80,59	A
7	Inspektorat Jenderal	24,96	20,31	10,99	8,08	15,76	80,10	A
8	Ditjen KPAIL	23,91	20,00	12,90	8,36	15,84	81,01	A
9	BPSDMI	18,10	19,69	12,37	7,65	15,34	73,15	BB

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal pada penilaian SAKIP yang dilaksanakan di tahun 2021 sebesar 80,1 melebihi dari target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Capaian dari Indikator ini sebesar 102,43%.

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Sasaran 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

Indikator dari sasaran terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif, dan efisien dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 24 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	74,15%	105,92%
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	80%	100%	125%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	100%	111,11%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	91%	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74	75,71	102,31%

a. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;
3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Beberapa point pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran;
2. Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran;
3. Kecepatan pencairan anggaran;
4. Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat;
6. Keterbukaan Informasi Diklat;
7. Kecepatan Penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Kecepatan Penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
9. Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan;
10. Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana;
11. Ketersediaan Media Informasi.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 25 Hasil Pengolahan dari Survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran	4.60	92.00	Sangat Penting	3.82	76.40	Puas
2	Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran	4.58	91.60	Sangat Penting	3.86	77.20	Puas

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
3	Kecepatan pencairan anggaran	4.62	92.40	Sangat Penting	3.72	74.40	Puas
4	Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran	4.62	92.40	Sangat Penting	3.86	77.20	Puas
5	Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat	4.68	93.60	Sangat Penting	3.90	78.00	Puas
6	Keterbukaan Informasi Diklat	4.64	92.80	Sangat Penting	3.78	75.60	Puas
7	Kecepatan Penyampaian data TLHP	4.64	92.80	Sangat Penting	3.54	70.80	Puas
8	Kecepatan Penyampaian data TLHP	4.58	91.60	Sangat Penting	3.64	72.80	Puas
9	Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan	4.58	91.60	Sangat Penting	3.64	72.80	Puas
10	Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana	4.74	94.80	Sangat Penting	3.36	67.20	Puas
11	Ketersediaan Media Informasi	4.56	91.20	Sangat Penting	3.66	73.20	Puas
Rata-Rata		4.62	92.44	Sangat Penting	3.71	74.15	Puas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa puas terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Nilai yang diperoleh sebesar 74,15 melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator ini sebesar 105,92%. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

b. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas Tahun 2022, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian,

Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan setiap Inspektorat pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Seluruh kegiatan pengawasan yang meliputi audit, pengawalan, reviu dan kegiatan Non PKPT lainnya (sesuai arahan pimpinan) seluruhnya dapat terlaksana. Data kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT dapat dilihat pada dokumen perbandingan rencana PKPT dengan realisasi kegiatan pengawasan. Realisasi untuk indikator ini adalah 100% semua kegiatan pengawasan terlaksana di tahun 2021. Capaian yang diperoleh indikator ini adalah 125%. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan tugas Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan penting dan harus terlaksana untuk mengawasi dan mengawal kegiatan internal Satuan Kerja Kementerian Perindustrian agar berjalan dengan efektif dan efisien.

c. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 1 pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini sebesar 100% dengan capaian mencapai 111,11%. Keberhasilan pencapaian realisasi 100% dikarenakan penugasan APIP telah disesuaikan dengan kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki APIP tersebut.

d. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 di Kementerian Perindustrian yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian Unit Eselon I dilakukan sebatas pada komponen pengungkit. Penilaian komponen hasil dilaksanakan hanya pada Unit Pusat (Tingkat Kementerian).

Dalam rangka mewujudkan penguatan pengawasan telah dilakukan PMPZI ke beberapa satker. Sebanyak 12 satker telah di kunjungi pada bulan November dan 2 satker telah di jadwalkan dikunjungi pada awal desember dari total 31 satker yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM Tahun 2021. Sepuluh satuan kerja Kementerian Perindustrian yang memperoleh predikat WBK/WBBM. Satuan Kerja

yang diusulkan mendapatkan predikat WBK berjumlah 6 (enam) ialah Balai Besar Industri Agro, Balai Diklat Industri Denpasar, Balai Besar Logam dan Mesin, Balai Diklat Industri Jakarta, SMK-SMTI Bandar Lampung, dan Balai Diklat Industri Yogyakarta. Satuan Kerja yang diusulkan mendapat predikat WBBM ada 4 (empat) satker ialah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo, Baristand Industri Samarinda, SMK-SMTI Yogyakarta, dan SMK-SMTI Pontianak.

Hasil pencapaian Unit Eselon I hanya dinilai pada komponen pengungkit, dengan nilai rata-rata sebesar 33,74 dari bobot maksimal 36,30 atau sebesar 92,96%. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal nilai akhir yang diperoleh adalah 33,02 dari bobot maksimal 36,30 (90,96%). Hasil PMPRB unit pusat dinilai dari komponen Pengungkit yang terdiri dari Pemenuhan, Hasil Antara dan *Reform*. Selain itu juga dinilai dari komponen Hasil yang terdiri dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan Kinerja Organisasi. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil self assessment mencapai 91%. Untuk realisasi dari indikator ini sebesar 91% dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam menjalankan fungsinya dilakukan dengan maksimal yang berpedoman pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM Aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.

e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator Capaian Kinerja pada bagian keuangan adalah capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2021, Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan,

efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA diperoleh dari penyesuaian 13 bobot indikator, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran;
2. Data Kontak;
3. Penyelesaian Tagihan;
4. Capaian Output;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Revisi DIPA;
7. Deviasi Halaman III DIPA;
8. LPJ Bendahara;
9. Perencanaan Kas;
10. Kesalahan SPM;
11. Retur SP2D;
12. Pagu Minus;
13. Dispensasi

Nilai yang diperoleh di tahun 2021 sebesar 75,71 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 102,31%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Sasaran 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Indikator dari sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 26 Sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	76,33	107,5%
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	64%	106,67%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%	77,88%	103,84%

a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Indikator ini adalah indikator baru sehingga pada saat dilakukan penilaian rata-rata, hanya 1 (satu) unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Rata-rata profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2021 diperoleh dari jumlah nilai jumlah pegawai, yaitu:

$$\frac{\sum \text{Nilai ASN}}{\sum \text{ASN}} = \frac{1832}{24} = 76,33$$

Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 76,33 dengan capaian sebesar 107,5%. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi

yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

b. Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan

Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah *sharing knowledge*/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Perhitungan realisasi diperoleh dari pelaksanaan PKS sebanyak 7 PKS, yaitu

1. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I;
2. PKS penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020;
3. PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP;
4. PKS Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021;
5. PKS *Overview* Manajemen Resiko Indeks;
6. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18;
7. CRMO bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tujuh PKS tersebut dibagi dengan jumlah diklat substansi yang telah dilaksanakan sebanyak 11 diklat substansi yang telah diikuti oleh auditor dan dikali 100%. Diklat substansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I diselenggarakan oleh BKN Tanggal 15 Maret 2021 – 18 Maret 2021;
2. Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman diselenggarakan Pusdiklat BPKP tanggal 26 April 2021 – 30 April 2021;
3. Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman diselenggarakan Pusdiklat BPKP tanggal 7 Juni 2021 – 11 Juni 2021;
4. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18 diselenggarakan oleh BKN Tanggal 21 Juli 2021 – 26 Juli 2021.

5. Diklat Program Sertifikasi Auditor Forensik (CfrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 12 Juli 2021 – 16 Juli 2021;
6. Pelatihan dan Sertifikasi CGAA Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 10 Agustus 2021 – 13 Agustus 2021;
7. Pelatihan dan Sertifikasi CRMO Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 10 Agustus 2021 – 13 Agustus 2021;
8. Webinar *Risk Management Based On ISO 31000: 2018* diselenggarakan oleh Revolution Mind Indonesia tanggal 13 September 2021;
9. Webinar *Professional Risk Management Training Certification* diselenggarakan oleh Revolution Mind Indonesia tanggal 18 September 2021 – 19 September 2021;
10. Seminar *Risk Based Auditing* diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors tanggal 6 Desember 2021 – 7 Desember 2021;
11. Seminar *Root Cause Analysis* diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors tanggal 20 Desember 2021 – 21 Desember 2021.

Realisasi indikator ini sebesar 64% (7 PKS dibagi dengan 11 Diklat Substansi). Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 106,67%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP.

c. Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat

Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Diklat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Tabel Pelaksanaan diklat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
1	Bimbingan Teknis Fungsional Perencana Tahun Anggaran 2021	Biro OSDM	15 Maret – 17 Maret 2021		1. Y.L Didid Kristiawan 2. Rika Betty Nurindah Rustiawati
2	Seminar Virtual Kearsipan	Biro Umum	17 Maret 2021		1. Herry Rusli Kuncoro 2. Hilma 3. Desmy Fitria
3	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 1	BKN	15 Maret – 18 Maret 2021		Fitriah A. Somad
4	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 1	BKN	25 Maret 2021		Fitriah A. Somad
5	Diklat Pembentukan Auditor Ahli secara <i>E-Learning</i>	Pusdiklatwas BPKP	8 April – 19 April 2021		Armanita Kusumaningrum
6	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Pusdiklatwas BPKP	26 April – 30 April 2021		1. Oktaviyanto Jimat Wibowo; 2. Paramitha Susilo Budi Utari 3. Ciendy Martha Gayatri 4. Noer Dwi Rizkia Putri 5. Tjahyono
7	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh	Pusdiklatwas BPKP	2 Juni – 15 Juni 2021		Armanita Kusumaningrum

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
8	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Pusdiklatwas BPKP	7 Juni – 11 Juni 2021		1. Dyan Garneta Paramita Sari 2. Zita Tessa Rahayani 3. Farida Nurfitriana
9	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pengkajian Informasi Nasional (PUSPIN)	14 Juni – 17 Juni 2021		Fernando Noverian Juve Vieri Rahmanto
10	Magang Online Industri 4.0	Biro OSDM	21 Juni – 25 Juni 2021		Aruma Keicha Chandritia
11	Diklat dan Sertifikasi PBJ Dasar Non Jabatan Fungsional Auditor	Pusdiklatwas BPKP	1 Juli – 14 Juli 2022		1. Noa Salfhali 2. Prasetyo Putra Mahardika 3. Elizabeth Frycillya Aritonang
12	Magang Online Industri 4.0 Batch 2	Biro OSDM	12 Juli – 16 Juli 2021		1. Marmia Adriana 2. Hilma
13	Diklat Program Sertifikasi Auditor Forensik (CfrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pusdiklatwas BPKP	12 Juli – 16 Juli 2021		1. Dyan Garneta Paramita Sari 2. Hariadi Amri 3. Giry Rachman 4. Denny Chandra Arifin 5. Ridja Muda Utama 6. Rayersad Saesar A.
14	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18	BKN	21 Juli – 26 Juli 2021		Fitriah A. Somad

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
15	Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18	BKN	6 Agustus 2021		Fitriah A. Somad
16	Pelatihan dan Sertifikasi CGAA Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pusdiklatwas BPKP	10 Agustus – 13 Agustus 2021		1. Azka Rianto Tedja Ningrat 2. Mokhammad Subuh Washardito 3. Armanita Kusumaningrum 4. Farida Nurfitriana 5. Zaky Al Afkar
17	Pelatihan dan Sertifikasi CRMO Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pusdiklatwas BPKP	10 Agustus – 13 Agustus 2021		1. Afrizal Haris 2. Oktaviyanto Jimat Wibowo 3. Indra Laksmana 4. Alexander Hamonangan Nainggolan
18	Ujian Sertifikasi Auditor Forensik (CfrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pusdiklatwas BPKP	18 Agustus – 20 Agustus 2021		1. Dyan Garneta Paramita Sari 2. Hariadi Amri 3. Giry Rachman 4. Denny Chandra Arifin 5. Ridja Muda Utama 6. Rayersad Saesar A.
19	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CGCAE Batch XII	Pusdiklatwas BPKP	12 Agustus – 26 Agustus 2021		Jonni Afrizon
20	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CGCAE Batch XII	Pusdiklatwas BPKP	30 Agustus – 2 September 2021		Jonni Afrizon

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
21	Ujian Sertifikasi CGCAE Batch XII	Pusdiklatwas BPKP	8 September 2021 – 9 September 2021		Jonni Afrizon
22	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CGCAE Batch XIII	Pusdiklatwas BPKP	23 Agustus – 3 September 2021		1. Liliek Widodo 2. Wawas Swathatafrijiah
23	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CGCAE Batch XIII	Pusdiklatwas BPKP	6 September – 9 September 2021		1. Liliek Widodo 2. Wawas Swathatafrijiah
24	Ujian Sertifikasi CGCAE Batch XIII	Pusdiklatwas BPKP	15 September 2021 – 16 September 2021 (Ujian Sertifikasi)		1. Liliek Widodo 2. Wawas Swathatafrijiah
25	Webinar: <i>Risk Management Based On ISO 31000: 2018</i>	Revolution Mind Indonesia	13 September 2021		Afrizal Haris
26	Webinar: <i>Professional Risk Management Training Certification</i>	Revolution Mind Indonesia	18 September – 19 September 2021		1. Afrizal Haris 2. Hilma 3. Oktaviyanto Jimat Wibowo 4. Indra Laksmiana 5. Ciendy Martha Gayatri 6. Atik Rindarsih 7. Sumaryono
27	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certification of Government Chief Audit Executive CGCAE</i> Angkatan ke -17	Pusdiklatwas BPKP	14 Oktober – 12 November 2021		Abdulah

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
28	Sertifikasi <i>Certification of Government Chief Audit Executive CGCAE</i> Angkatan ke -17	Pusdiklatwas BPKP	15 November 2021		Abdulah
29	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certification of Government Chief Audit Executive CGCAE</i> Bagi Pimpinan APIP	Pusdiklatwas BPKP	18 Oktober – 22 Oktober 2021		Masrokhani
30	Sertifikasi <i>Certification of Government Chief Audit Executive CGCAE</i> Bagi Pimpinan APIP	Pusdiklatwas BPKP	25 Oktober 2021		Masrokhani
31	<i>National Conference IIA</i>	The Institute of Internal Auditors	27 Oktober – 29 Oktober 2021		1. Jelita Berlina, SE, MM 2. Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P., M.Sc, CGAP, CIA. 3. Rizki Perdana, SE, MT 4. Alexander Hamonangan N., SIP, M.Sc 5. Indra Laksmana, S.T.P., CGAP 6. Rachmat Muhbianto, S.Pt, MM 7. Hilma, S.E, M.Ak 8. Ayu Budiarti, SE 9. Indra Irwan, S.AP

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
32	Seminar <i>Risk Based Auditing</i>	The Institute of Internal Auditors	6 Desember – 7 Desember 2021		Oktaviyanto Jimat Wibowo
33	Seminar <i>Root Cause Analysis</i>	The Institute of Internal Auditors	20 Desember – 21 Desember 2021		1. Jelita Berlina 2. Rizki Aviandri 3. Wuryanto
Persentase					77,88%

$$\frac{\sum \text{APIP yang mendapatkan diklat}}{\sum \text{Seluruh APIP}} = \frac{81}{104} \times 100\% = 77,88\%$$

Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 77,88% dengan Capaian 103,84%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah pengadaan diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam hal ini terkait kompetensi dan kapabilitas APIP selama tahun 2021 dapat berjalan dengan optimal.

3.1.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output/outcome) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2021, Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

A. Sumber Daya Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sebesar Rp32.643.630.000,- namun kemudian sepanjang tahun 2021 mengalami 10 kali revisi yang ditujukan untuk *Refocussing* dan Realokasi Anggaran untuk Vaksin dan Program Vaksinasi Nasional, Realokasi Anggaran untuk Pengadaan Bantuan Masker Untuk Masyarakat (Internal KRO Baru), Pemotongan dan *Self Blocking Refocussing* Pengadaan Bantuan Oksigen, Oksigen Generator, serta Vaksinasi Nasional, dan Revisi Pengalihan Dana Berlebih kepada BPSDMI Untuk Kegiatan Sherpa G20. Sehingga pada akhir tahun 2021, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp27.066.374.000,- atau berkurang sebesar Rp5.577.256.000,- (17,09%) dari pagu anggaran pada awal tahun anggaran. Dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 28 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal dari tahun ke tahun

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2018	Rp32.021.622.000,-	Rp30.977.730.396,-	96,74
2	2019	Rp35.531.010.000,-	Rp34.039.890.721,-	95,80
3	2020	Rp25.255.171.000,-	Rp24.355.105.188,-	96,44
4	2021	Rp27.066.374.000,-	Rp26.898.446.068,-	99,38

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Strategis, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran 2021 (99,38%), maka rasio penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 29 Rasio penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)*	Capaian Anggaran(%)**	Rasio Terhadap penyerapan anggaran (%)***
1	Indikator Kinerja Sasaran	100	99.38	99.38
2	Indikator Kinerja Utama	100	98.04	8.04
3	Realisasi Fisik	100	-	-

)* realisasi dibandingkan dengan target kinerja;

)** realisasi anggaran dibandingkan dengan pagunya;

)***) realisasi anggaran dibandingkan dengan realisasi total anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

Berdasarkan tabel tersebut maka rata-rata pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2021 sebesar 100% dengan menggunakan 99,38% dari pagu anggaran yang dialokasikan. Seluruh indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dapat seluruhnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2021 sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) orang PNS dan 17 (tujuh belas) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Angka ini berbeda dibandingkan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri atas 44 (empat puluh empat) orang PNS dan 19 (Sembilan belas) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat

Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

3.1.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

Pada tahun 2021, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai 18 (delapan belas) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- 1) Penerapan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
- 2) Capaian IACM Inpektorat Jenderal;
- 3) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dari 18 (delapan belas) poin indikator kinerja, seluruh Indikator telah tercapai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain, kondisi dan situasi yang masih belum stabil, dimana masih adanya pembatasan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa kegiatan terpaksa hanya dapat dilakukan secara daring. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat tercapai dengan optimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2021 sebesar Rp. 32.643.630.000,-, namun anggaran tersebut mengalami perubahan/revisi 10 kali selama tahun 2021. Berikut ini adalah tabel revisi DIPA selama tahun 2021 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan:

Tabel 30 Revisi DIPA selama tahun 2021 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan

Revisi Ke-	Tanggal	DS – DIPA	Nilai (Rp)	Dasar	Revisi
Awal	23 Nov 2020	9315-9954-7630-0025	32.643.630.000	Dipa Awal Inspektorat Jenderal	-
1	16 Feb 2021	6434-7017-3803-2480	31.643.630.000	Refocussing dan Realokasi Anggaran untuk Vaksin dan Program Vaksinasi Nasional	DIPA
2	17 Mar 2021	5052-0604-5025-4965	32.123.630.000	Realokasi Anggaran untuk Pengadaan Bantuan Masker Untuk Masyarakat (Internal KRO Baru)	DIPA
3	4 Jun 2021	3969-0877-8390-8571	29.811.257.000	Penghematan Anggaran Tunjangan Kinerja untuk Pengaman Program Vaksinasi Nasional	DIPA
4	18 Aug 2021	0000-6299-5500-6057	27.568.232.000	Pemotongan dan Self Blocking Refocussing Pengadaan Bantuan Oksigen, Oksigen Generator, serta Vaksinasi Nasional	DIPA
5	15 Sep 2021	0536-5801-1390-9150	26.512.974.000	Pemotongan Self-Blocking pada Revisi Sebelumnya	DIPA
6	8 Okt 2021	0536-5801-1390-9150	27.162.974.000	Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Antigen Pegawai ITJEN dan kegiatan Pengawasan oleh Pimpinan	DIPA
7	5 Nov 2021	7048-1493-3744-7629	27.162.974.000	Revisi Perbaikan Akun COVID-19 di ITJEN beserta perbaikan halaman III DIPA	DIPA

Revisi Ke-	Tanggal	DS – DIPA	Nilai (Rp)	Dasar	Revisi
8	24 Nov 2021	3310-7012-2170-6970	27.162.974.000	Revisi terkait ketidaksesuaian penggunaan Akun COVID-19 yang sebelumnya telah direalisasikan	DIPA
9	7 Des 2021	3008-0977-5591-7510	27.066.374.000	Revisi Pengalihan Dana Berlebih kepada BPSDMI Untuk Kegiatan Sherpa G20	DIPA
10	23 Des 2021	3008-0977-5591-7510	27.066.374.000	Revisi Pemutakhiran POK Optimalisasi Sisa Anggaran ITJEN Tahun 2021	Pemutakhiran POK

Revisi DIPA tersebut dibiayai melalui kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.898.446.068,- atau 99,38% dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal (Revisi DIPA ke-10). Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 31 Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Layanan Perkantoran	20.750.871.000	20.701.595.716	99,76
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4.439.258.000	4.360.823.965	98,23
Layanan Sarana Internal	644.437.000	644.348.980	99,98
Layanan Pengawasan Internal	260.380.000	251.769.560	96,69
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	371.428.000	339.907.847	91,51
Bantuan Produk	600.000.000	600.000.000	100
TOTAL	27.066.374.000	26.898.446.068	99,38

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal langsung dialokasikan dan dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja, sehingga seluruh anggaran terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
6036.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	20.750.871.000	20.701.595.716	99,76
001	Gaji dan Tunjangan		15.242.091.000	15.202.503.756	99,74
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.508.780.000	5.499.091.960	99,82
6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4.439.258.000	4.360.823.965	98,23
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		732.230.000	717.073.914	97,93
053	Pengelolaan Keuangan		225.520.000	225.272.250	99,89
055	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		453.467.000	450.825.816	99,41
056	Pengelolaan Kepegawaian		393.124.000	389.633.000	99,11
057	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		982.496.000	977.871.963	99,53

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
059	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokol		162.182.000	158.432.000	97,68
060	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		1.490.239.000	1.441.715.022	96,74
6036.EAD	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	644.437.000	644.348.980	99,98
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		644.437.000	644.348.980	99,98
6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	1 Layanan	260.380.000	251.769.560	96,69
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		260.380.000	251.769.560	96,69
6036.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		371.428.000	339.907.847	91,51
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		135.408.000	116.579.000	86,09
052	Penyusunan Laporan		236.020.000	223.328.847	94,62
6036.QEC	Bantuan Masker		600.000.000	600.000.000	100
051	Pengadaan Masker Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000	600.000.000	100
T O T A L			27.066.374.000	26.898.446.068	99,38

3.3 Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan Langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Kendala dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Sekretariat inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
<i>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</i>					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 Laporan	Tidak ditemukan masalah	Koordinasi dilaksanakan secara rutin, baik melalui media surat menyurat maupun virtual meeting
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 Laporan	Tidak ditemukan masalah	Koordinasi dilaksanakan secara rutin, baik melalui media surat menyurat maupun virtual meeting.
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Tidak ditemukan kendala dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan	Klinik Konsultasi menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat dengan tuntas tanpa pengecualian.
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 Laporan	Masih adanya tindak lanjut hasil pengawasan oleh satker yang belum ditindaklanjuti lebih dari 90 hari	Adanya forum khusus secara rutin dengan masing-masing unit kerja dalam rangka mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%	Beberapa tim pembangun dan tim penilai mandiri perlu peningkatan pemahaman regulasi terkait reformasi reformasi birokrasi	Sosialisasi oleh KemenPAN RB terkait pemahaman umum, persiapan, pelaksanaan dan rencana aksi tindak lanjut pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi selanjutnya.
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	1 Kegiatan	Strategi pencapaian kinerja masih belum relevan, pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan	Penerapan pengendalian internal yang efektif. Pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Kementerian.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Tidak semua auditi Itjen (Satker) yang berpartisipasi dalam survei pelaksanaan pengawasan	Diharapkan untuk kedepannya seluruh satker dapat berpartisipasi mengikuti survei terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan agar hasil yang diperoleh lebih akurat secara keseluruhan sehingga kegiatan pengawasan kedepannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan auditi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	IACM Level 3	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Penyusunan PKPT berbasis Risiko, Finalisasi Konsep Pedoman Kendali Mutu (Quality Assessment) secara periodik baik internal maupun eksternal melalui telaah sejawat/ <i>peer review</i> , pengajuan usulan anggaran APIP yang memperhatikan risiko organisasi dengan data dukung berupa kertas kerja analisis kegiatan, skala prioritas anggaran dan Perjanjian Kinerja.
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	75%	Tidak ditemukan masalah yang perlu perhatian lebih	Diharapkan untuk kedepannya penggunaan produk dalam negeri dapat tercapai 100% dalam pengadaan barang dan jasa.
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Penerapan regulasi bidang industri yang ditetapkan diharapkan dapat berjalan dengan efektif secara keseluruhan agar tujuan kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					organisasi dapat terlaksana dengan optimal.
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,2	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Perlu ditingkatkan kinerja masing-masing unit di lingkungan Inspektorat Jenderal agar lebih akuntabel dan profesional serta perlu adanya koordinasi internal untuk 73andemic dan mewujudkan SAKIP yang lebih baik.
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Kinerja dukungan manajemen terhadap kegiatan pengawasan perlu dimaksimalkan terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan kecepatan penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		Koordinasi Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	2 Laporan	Beberapa kegiatan pengawasan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana PKPT yang telah disusun	Pelaksanaan kegiatan pengawasan disesuaikan dengan kondisi dan situasi pandemi yang sampai saat ini masih menjadi kendala pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, semua kegiatan pengawasan dapat terlaksana sampai dengan akhir tahun, walaupun beberapa kegiatan harus dilakukan secara daring.
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Kompetensi SDM pengawasan perlu ditingkatkan tidak hanya terkait perannya menjalankan tugas dan fungsi. Namun kompetensi lain yang mendukung pelaksanaan penugasan tersebut.
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Perlu disusun Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedepannya pada Inspektorat Jenderal dan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					dipantau pelaksanaannya secara berkala agar indikator penilaian dapat terpenuhi dengan maksimal.
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	74	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Diharapkan kedepannya Nilai IKPA inspektorat Jenderal dapat terus melebihi dari target yang telah ditetapkan.
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Kedepannya agar Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas kinerja.
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	<i>Sharing Knowledge</i> antar APIP perlu ditingkatkan agar kompetensi dapat merata sehingga kinerja dan produktivitas dapat berjalan optimal.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Diharapkan kedepannya agar lebih banyak APIP yang mengikuti diklat kompetensi dengan tujuan agar kapabilitas dan produktivitas dapat meningkat

BAB IV. PENUTUP

A. Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021, secara umum dapat dikemukakan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2021 telah berjalan dengan baik, hal ini tercermin dari tercapainya seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran;
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Pelaksanaan Penilaian PMPRB tahun 2021 di lingkungan Kementerian Perindustrian, dapat disimpulkan bahwa hasil akhir PMPRB diperoleh indeks RB Kementerian Perindustrian tahun 2021 unevaluated sebesar 84,32 dengan kategori A atau predikat *Sangat Baik*. Interpretasi atas hasil penilaian mandiri tersebut menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian telah memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja;
4. Berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, menjelaskan bahwa Pemaparan tentang hasil pemantauan atas rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP yang dilakukan sebelum Bimtek terkait empat elemen yang belum mencapai level 3 yaitu elemen pengelolaan peran dan layanan, elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional dan elemen struktur tata Kelola, Menjelaskan Key Process Area (KPA) kapabilitas APIP di level 3 beserta rencana aksi yang diperlukan bagi perbaikan pada *Area of Improvement* untuk mencapai level 3, Identifikasi infrastruktur dan data pendukung yang diperlukan guna pemenuhan pernyataan pada level 3,

Pengenalan dan implementasi aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berbasis Web Dalam *Self-Assesment*. Masih diperlukan rencana tindak lanjut yang harus disusun dalam rangka mencapai level 3;

5. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 telah menerbitkan Majalah Solusi per triwulan, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2021 adalah situasi dan kondisi yang masih menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat di masa pandemi. Sehingga masih ada jadwal dan rencana kegiatan yang harus diubah dan pelaksanaannya sebagian besar dilakukan melalui daring.

Kemudian, pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang masih belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dengan memanfaatkan sistem informasi, diharapkan kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, namun demikian anggaran Inspektorat Jenderal belum mencukupi untuk mewujudkan sistem informasi yang handal.

C. Upaya Dan Strategi Pemecahan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah:

1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi terkait kebijakan pemerintah di masa pandemi dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator utama kinerja Inspektorat Jenderal;
2. Telah diusulkan penambahan anggaran untuk mewujudkan sistem informasi pengawasan ke Sekretariat Jenderal;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2021 ini disusun dimana menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan

ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022								
TUJUAN								
Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Level Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	3		Level		27,066,374,000	26,898,446,068
		Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	BB		Nilai			
		Terselenggaranya dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal	12 Bulan		Layanan			
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN								
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2	Laporan	Laporan		1,273,855,000.00	1,258,839,683.00
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4	Laporan	Laporan		3,400,000.00	3,392,000.00
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85	Persen	Persen		162,182,000.00	158,432,000.00
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	2	Laporan	Laporan		260,380,000.00	251,769,560.00
SS.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71	Persen	Persen		264,164,000.00	255,852,483.00
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		115,490,000.00	90,210,000.00
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	Persen	75	Persen		880,000.00	880,000.00
		Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU	Level	3 IACM	Level		840,897,000.00	823,156,914.00
SS.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	Persen	75	Persen		1,244,437,000.00	1,244,348,980.00

SS.5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persen	74	Persen		339,700,000.00	339,642,816.00
SS.6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	78,20	Nilai		134,528,000.00	115,699,000.00
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN								
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	70			21,871,021,000.00	21,815,199,679.00
		Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	Persen	80			4,000,000.00	3,998,000.00
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	Persen	91			16,050,000.00	4,010,000.00
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	74			227,720,000.00	227,472,250.00
SS.8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Persen	71			49,800,000.00	48,872,000.00
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Persen	60			39,000,000.00	38,992,000.00
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	Persen	75			166,670,000.00	166,037,000.00



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



<http://intranet.kemenperin.go.id>

[Home](#) > [ALKI](#)

[Logout](#)

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Setitjen TA 2021

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.c. Biaya Langganan Dan Operasional Perkantoran	1.193.550.000	100,14%	99,79%	100,00%	100,00%
2.	6036.EAA - 6036.eaa.001.001.a. Gaji Dan Tunjangan	15.242.091.000	100,29%	99,74%	100,00%	100,00%
3.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.a. Honorarium Operasional	1.705.834.000	105,94%	99,98%	100,00%	100,00%
4.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.b. Persediaan Dan Perlengkapan Kantor	589.970.000	101,53%	97,12%	100,00%	100,00%
5.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.e. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Operasional Kantor	858.992.000	100,47%	99,75%	100,00%	100,00%
6.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.d. Koordinasi Dan Layanan Pimpinan	1.160.434.000	90,00%	99,93%	100,00%	100,00%
7.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. C. Pelayanan Umum Dan Rapat Kedinasan	777.740.000	105,58%	106,14%	100,00%	100,00%
8.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. B. Penataan Dan Penghapusan Arsip/dokumen Pengawasan Dari Arsip Inaktif	33.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. A. Koordinasi Dalam Rangka Penataan Ketatausahaan Dan Kearsipan Inspektorat Jenderal	90.196.000	100,00%	99,72%	100,00%	100,00%
10.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.k. Fasilitas Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun Pns Inspektorat Jenderal	6.820.000	100,00%	96,68%	100,00%	100,00%
11.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.j. Pemantauan Dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Itjen	2.200.000	100,00%	99,45%	96,00%	96,00%
12.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.g. Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai Itjen	9.400.000	100,00%	99,91%	100,00%	100,00%
13.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.f. Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi Sdm Inspektorat Jenderal	16.600.000	100,00%	94,53%	99,00%	99,00%
14.	6036.EAB - 6036.eab.001.057.d. Pengembangan Informasi Pengawasan	38.160.000	115,72%	100,66%	100,00%	100,00%
15.	6036.EAB - 6036.eab.001.059. A. Pemutakhiran Data Dan Informasi	11.036.000	100,00%	98,88%	100,00%	100,00%
16.	6036.EAB - 6036.eab.001.059. B. Penerbitanmajalah Solusi	151.146.000	100,90%	97,60%	100,00%	100,00%
17.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. A. Pelaksanaan Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	4.926.000	465,41%	98,05%	100,00%	100,00%
18.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. B. Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	16.050.000	100,00%	24,98%	100,00%	100,00%
19.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. C. Penilaian Index Manajemen Risiko (mri) Kementerian Perindustrian	115.490.000	100,00%	78,11%	99,00%	99,00%
20.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. D. Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian(pmprb)	110.450.000	109,24%	95,82%	100,00%	100,00%

21.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. E. Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas Dalam Rangka Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih	148.788.000	100,00%	97,58%	100,00%	100,00%
22.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. F. Pembinaan Dan Pengawasan Pimpinan	652.650.000	100,00%	98,60%	0,00%	0,00%
23.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.e. Reviu Rk Bmn	2.200.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
24.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.e. Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	31.000.000	100,00%	99,97%	100,00%	100,00%
25.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.d. Pelatihan Di Kantor Sendiri (in-house Training)	39.000.000	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%
26.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.b. Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal	157.270.000	100,00%	99,60%	100,00%	100,00%
27.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.c. Fasilitasi Reviu Rkaki	9.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.d. Penyusunan Pkpt Inspektorat Jenderal	2.900.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
29.	6036.EAB - 6036.eab.001.051. A. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2022	152.000.000	100,00%	90,06%	100,00%	100,00%
30.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.e. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Program Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	566.130.000	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%
31.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.a. Pelayanan Perbendaharaan	106.720.000	100,00%	99,80%	100,00%	100,00%
32.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan Dan Bmn	10.150.000	100,00%	99,69%	100,00%	100,00%
33.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.c. Penyusunan Laporan Keuangan Dan Bmn	9.730.000	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%
34.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.d. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	1.560.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
35.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.f. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Keuangan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	95.160.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
36.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.a. Pengelolaan Pelayanan, Bantuan Dan Konsultasi Hukum	92.767.000	100,00%	99,33%	100,00%	100,00%
37.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.b. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal	2.200.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
38.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.c. Penyusunan Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja	14.800.000	100,00%	98,93%	100,00%	100,00%
39.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.d. Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor	4.000.000	100,00%	55,00%	100,00%	100,00%
40.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.e. Evaluasi Kelembagaan Internal Dan Organisasi Inspektorat Jenderal	2.200.000	100,00%	99,64%	100,00%	100,00%
41.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.f. Pembinaan Dan Pengawasan Aspek Kepegawaian Dan Tata Laksana Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	337.500.000	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%
42.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal	130.834.000	100,00%	96,41%	100,00%	100,00%
43.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.b. Penyusunan Dan Revisi Rkaki Inspektorat Jenderal	2.200.000	196,50%	100,00%	100,00%	100,00%
44.	6036.EAD - 6036.ead.001.052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	644.437.000	100,48%	99,99%	0,00%	0,00%
45.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. A. Koordinasi Dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	147.820.000	100,00%	95,20%	100,00%	100,00%
46.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. B. Temu Teknis Penyuluhan / Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	110.360.000	100,00%	98,66%	100,00%	100,00%
47.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. C. Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi Dan Reviu Inspektorat Jenderal	2.200.000	100,00%	98,64%	100,00%	100,00%
48.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. A. Koordinasi	126.088.000	100,00%	86,51%	100,00%	100,00%

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Kerja						
49.	6036.EAL - 6036. Eal.001.052. F. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/evaluasi Hasil Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	52.200.000	100,00%	98,93%	0,00%	0,00%
50.	6036.EAL - 6036. Eal.001.052. E. Penilaian Sakip Eselon I	1.100.000	100,00%	99,82%	100,00%	100,00%
51.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. D. Penyusunan Laporan Apip	3.400.000	100,00%	99,76%	0,00%	0,00%
52.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. C. Penyusunan Laporan Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	3.960.000	100,00%	99,65%	100,00%	100,00%
53.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. B. Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Terkait Isu-isu Aktual Bidang Industri	109.200.000	100,00%	89,37%	100,00%	100,00%
54.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. A. Koordinasi Analisis Dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan	66.160.000	100,00%	99,24%	96,00%	96,00%
55.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. E. Reviu Renstra	4.480.000	100,00%	59,82%	100,00%	100,00%
56.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. D. Penilaian Sakip Eselon Ii Itjen	1.760.000	100,00%	99,43%	100,00%	100,00%
57.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. C. Penyusunan Dan Reviu Lakin Itjen Dan Set Itjen	1.100.000	100,00%	99,82%	100,00%	100,00%
58.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. B. Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan, Reviu Perkin	1.100.000	100,00%	99,82%	100,00%	100,00%
59.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. F. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	880.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		25.981.089.000	96,62%	95,63%	89,86%	89,86%

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



<http://intranet.kemenperin.go.id>

[Home](#) > [Monev Tapkin](#)

[Logout](#)

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. Terwujudnya keefektifan dan keefisienan program kerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian													
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi *) IKU	91,5 persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	90 persen
	Pagu = Rp. 112.560.000												
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	90 Persen
	Pagu = Rp. 92.767.000												
	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	0 Persen
	Pagu = Rp. 52.200.000												
	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU	1,4 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	0 Persen
	Pagu = Rp. 147.820.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 405.347.000												
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik													
	Nilai RB area penguatan pengawasan	71 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	97%	3 Persen
	Pagu = Rp. 264.164.000												
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kemenperin *) IKU	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	78%	0 Level
	Pagu = Rp. 115.490.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 379.654.000												
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	1 Persen
	Pagu = Rp. 880.000												
	Capaian IACM Itjen *) IKU	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66%	97%	1 Level
	Pagu = Rp. 1.004.236.000												
	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0 Persen
	Pagu = Rp. 644.437.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 1.649.553.000												
4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	101%	1 Persen
	Pagu = Rp. 38.160.000												
	Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	0 Persen

Pagu = Rp. 4.400.000

Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT

80 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 87% 0 Persen

Pagu = Rp. 130.088.000

Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai

90 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 99% 0 Persen

Pagu = Rp. 11.036.000

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

90 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 95% 0 Persen

Pagu = Rp. 16.600.000

Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen

91 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 25% 0 Persen

Pagu = Rp. 16.050.000

Total Pagu Sasaran = Rp. 216.334.000

5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat

75 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0 Persen

Pagu = Rp. 9.400.000

Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan

60 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0 Persen

Pagu = Rp. 72.200.000

Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor

92 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 55% 0 Persen

Pagu = Rp. 4.000.000

Layanan Perkantoran

12 Layanan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 100% 0 Layanan

Pagu = Rp. 23.239.001.000

Total Pagu Sasaran = Rp. 23.324.601.000

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian